

Di pesantren Luhur Al-Husna keseluruhan santri memiliki berbagai macam latar belakang keluarga, ras, bahasa dan suku yang berbeda. Adapun suku-suku di dalamnya yakni suku Jawa, Madura, Banjar, Aceh, Sasak dan Makassar. Dari berbagai suku yang ada, santri yang berasal dari suku Jawa dan Madura adalah yang paling banyak mendiami pesantren ini.

Untuk mempererat hubungan dari berbagai macam santri bahasa Indonesia adalah bahasa yang sering digunakan untuk dijadikan sebagai komunikasi. Dan para santri akan menggunakan bahasanya sendiri ketika melakukan komunikasi antar sesama. Hal ini dilakukan karena tidak semua santri mengerti bahasa yang dimiliki antar santri.

Selain itu, organisasi sosial pesantren Luhur Al-Husna memiliki sistem kekerabatan yang sama dengan sistem organisasi pesantren salaf lainnya. Dan pesantren ini mengikuti alur organisasi pesantren pada umumnya. Pesantren ini terdapat struktur organisasi yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing yang sudah di musyawarahkan terlebih dahulu oleh pengasuh, dewan penasehat, dewan asatidz dan juga pengurus lainnya.

Agenda yang ada pada pesantren ini dijadikan sebagai wadah untuk berkumpulnya para santri tanpa memandang perbedaan. Seperti kerja bhakti bersih-bersih pondok, Rutinan Istighotsah, agenda peringatan Maulid Nabi Muhammad, Tasyakuran, serta acara-acara hari besar Islam lainnya. Semua santri ikut gotong royong melaksanakan tugasnya masing-masing.

B. Manajemen pengelolaan Pesantren Luhur Al-Husna

Manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan. Aktivitas yang dilakukan dalam suatu manajemen dilakukan sebagai usaha mengembangkan dan memimpin suatu tim atau kerjasama atau kelompok dalam satu kesatuan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga manajemen sangat berkaitan dengan kepemimpinan, dimana kata *manag* memiliki beberapa arti seperti memimpin, menangani, mengatur, atau membimbing. Kepemimpinan merupakan suatu aspek yang dinamis untuk mencapai suatu tujuan yang ada.

Pondok pesantren Luhur Al-Husna memiliki cara pengelolaan sendiri untuk mewujudkan visi misi yang ada dalam pesantren. Hal ini dilakukan dengan cara pemenuhan fasilitas pendidikan yang dibentuk untuk komitmen nyata dalam pengembangan dan oprasional pendidikan yang dilakukan oleh pesantren Luhur Al-Husna Surabaya. Fasilitas pendidikan tersebut adalah semua fasilitas fisik yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran di pesantren tersebut.

Selain itu terdapat fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran yang ada di pesantren Luhur Al-Husna Surabaya, supaya keberadaan pesantren menjadi dinamis. Serta memenuhi kebutuhan santri dalam mendukung kegiatan pembelajarannya dalam pesantren. Dengan demikian santri tidak dirumitkan oleh kebutuhan fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran. Untuk mendukung proses belajar mengajar saat di pesantren yakni dengan memberikan fasilitas.

dan sesudah masuk dalam dunia politik. Perbedaan yang terjadi yakni mengenai pengelolaan kiai Ali Maschan di pesantren dan menjadi anggota politik. mengenai hal tersebut menyebabkan kedudukan pesantren menjadi terbagi. Keadaan tersebut berdampak pada kehidupan dalam pesantren. Sehingga santri kecewa dengan kepemimpinan yang dilakukan kiai saat berada di ranah politik. Kiai pada saat menjabat politisi lebih mengunggulkan peran yang ada di kursi politiknya yang menjadi anggota DPR RI (F-PKB) periode 2009-2014, dan berada dalam bidang komisi VIII yang menangani bidang agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan, dan sebagai Dewan Kehormatan. Selanjutnya kegiatan belajar mengajar yang seharusnya dilakukan oleh kiai kini tergantikan oleh ustadz pilihan kiai sendiri. Meskipun kiai telah memberikan wacana politik yang aktual pada santri, serta memberi kebebasan kepada santri untuk masuk dalam ranah politik atau sebaliknya. Peristiwa tersebut dapat menjadikan santri memiliki pandangan tersendiri mengenai lingkungan yang ada.

Hal itu telah menjadikan aktifitas kiai dalam mengajar dan mengontrol pesantren kurang diperhatikan, sehingga menjadikan santri merasa terganggu dengan kegiatan yang dilakukan oleh kiai. Selain itu, menjadikan eksistensi kiai sendiri di pesantren menjadi berkurang.

Namun, keadaan seperti itu berbanding terbalik ketika kiai Ali Maschan tidak lagi masuk dalam ranah politik yakni pada tahun 2015 sampai sekarang. Kiai Ali Maschan telah mengelola pesantren Luhur Al-Husna tanpa membagi peranannya sebagai kiai. Dengan peristiwa tersebut dalam kehidupan pesantren Luhur Al-Husna menjadi harmonis dan saling menghormati satu dengan lainnya.

Kiai Ali Maschan masuk dalam dunia politik karena disebabkan oleh beberapa peristiwa. Peristiwa tersebut yakni terdapat perselisihan di PKB selama 5 tahun sampai mengeluarkan muktamar III. Sehingga kiai Ali Machan masuk di dalamnya untuk menjadi penengah atas perselisihan yang ada, hal ini disebabkan adanya hubungan kekeluargaan antara aktor yang ada dalam PKB. Perpecahan ketika itu mengenai pengangkatan ketua, yang didalamnya terdapat Muhaimin dan Gus Dur. Sehingga kiai Ali Maschan dijadikan sebagai penengah antara koalisi partai tersebut, dan kiai Ali Maschan aktif di partai PKB sampai konflik itu selesai. Kemudian kiai Ali di dorong untuk masuk dalam anggota Dewan.

Pada dasarnya sebelum Kiai Ali Maschan menjadi anggota DPR RI (F-PKB) beliau telah mencalonkan diri sebagai wakil Gubernur di Jawa Timur dengan bersanding Bapak Sunaryo pada tahun 2008. Namun cita-cita yang beliau inginkan belum bisa terwujud karena suara dalam pemilu tidak mencukupi. Sehingga pada tahun 2009 kiai Ali bergabung dengan partai PKB dan keluar dari PWNU Jatim. Karena keterlibatan kiai Ali dalam dunia politik, kedudukan kiai Ali di PWNU menjadi terasingkan. Mengenai keadaan tersebut kiai Ali bergabung dengan partai PKB dan kiai Ali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dengan basis suara di kota Malang, kemenangan tersebut menjadikan beliau mendapatkan kursi di DPR RI.

Kiai Ali Maschan ketika menjadi anggota DPR RI telah memegang tugas di komisi VIII dengan bidang menaungi keagamaan seperti haji dalam pengawasan fungsi itu ketika di lapangan, serta di bidang sosial bencana alam, KPAI, dan Basnaz. Selain menjadi anggota DPR kiai Ali juga di tunjuk menjadi

Dewan Kehormatan untuk mewakili partai PKB. Adapun tugas dalam Dewan Kehormatan yakni untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap kinerja dewan yang kurang efektif. Penyelidikan disini dilakukan untuk mencari bukti terhadap peristiwa dengan pelanggaran UU, kode etik, pada saat sebelum sesudah dan berlangsungnya sidang. Selain itu verifikasi dilakukan dalam proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi pengaduan.

Selesai masa jabatannya pada di kursi DPR RI tahun 2014, kiai Ali telah mencalonkan kembali untuk meraih kursi di DPR RI, namun angan-angan yang dimilikinya tidak tercapai. Setelah itu kiai Ali kembali lagi di percaturan PWNU Jatim dan menjadi ketua Rois Surya NU dan melaksanakan tugasnya sebagai kiai di pesantren Luhur Al-Husna.